



# THL Satpol PP Gianyar 4 Bulan Tak Digaji

## Sekda Mengaku Sekitar 300 THL Tidak Jelas

**GIANYAR** - Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Gianyar, belum dibayar selama 4 bulan. Kini THL dibuat bingung karena Kepala Satuan mereka, Cokorda Agusnawa digantikan oleh pejabat baru, Made Watha. Sekda Gianyar mengaku lambannya pembayaran gaji karena ada 300 THL

di satuan itu diduga tidak jelas penempatannya.

Salah satu THL Satpol PP dan Damkar Gianyar, Ayu, menyatakan gaji yang belum dibayar selama 4 bulan, sejak Januari-April, membuat semangat kerjanya menurun. "Saya sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya perempuan, tidak saja butuh makan, tapi untuk beli pembalut kalau datang bulan bagaimana?," ujarnya penuh tanya, kemarin (2/5).

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu, perempuan asal Kecamatan Gianyar itu

terpaksa meminjam uang ke kerabatnya. "Dua bulan pertama, saya sedikit sabar, karena kondisi yang sama juga terjadi di OPD lain. Ternyata sampai bulan ini, cuma di Satpol PP dan Damkar tidak ada kepastian," jelasnya.

THL lainnya yang bertugas di Bidang Damkar, Made, mengaku sempat diberi harapan oleh pimpinannya di bidang, jika gajinya selama empat bulan dipastikan akan segera cair dengan cara rapel. "Kenyataannya, sampai bulan Mei ini belum juga ada tanda-tanda gaji kami turun,"

jelasnya.

Kegelisahan para THL itu menyusul munculnya isu gaji mereka dalam tri wulan pertama sulit dicairkan karena kepala Dinas yang lama sudah dimutasi. THL mendapat isu jika pimpinan lama tidak mungkin untuk memproses gaji karena sudah digantikan oleh pimpinan baru. "Selama ini kami tetap bekerja dengan resiko yang kami hadapi. Kami hanya berharap bapak bupati memberikan jalan keluar, agar gaji kami segera dibayarkan dalam waktu

dekat ini," pintanya.

Pihkanya berharap, masalah ini segera ditangani. "Kami tidak banyak tuntutan kecuali gaji empat bulan belum dibayar agar diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga biaya kebutuhan keluarga sehari-hari bisa diatasi," tukasnya.

Di bagian lain, Sekda Gianyar, Made Gede Wisnu Wijaya menyatakan ada beberapa alasan gaji THL di satuan itu tersendat. "Pertama kami minta kajian atas penambahan THL dari tahun yang sebelumnya

yang cukup signifikan, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu pelaporan terhadap atasan," ujar Wisnu Wijaya.

Diakui, ujuk-ujuk ada penambahan di satuan tersebut. "Maka kami minta kajiannya dasar menambah berapa? Kenapa? dan lain sebagainya. Itu *kan* musti ada karena terkait dengan penganggaran," ujarnya.

Sekda mengaku menerima informasi THL di satuan itu mencapai 300 orang dan penempatannya tidak jelas. "Itulah yang kami tidak mengerti. Masak kami harus

membayar orang sejumlah itu, dimana ditempatkan *kan* musti harus jelas. Ini dalam rangka efektifitas dan efisiensi *kan* gitu ya," jelasnya.

Dengan adanya mutasi kepala satuan dari Cokorda Agusnawa ke Made Watha, pihaknya berhadapan masalah itu bisa selesai. "Kami berharap pejabat baru segera menuntaskan proses ini, kajian dibuatkan segera terkait jumlah tenaga yang ada. Kalau tidak ideal jangan harap kami tampung semua," tukasnya. (dra/dit)

Edisi : Jumat, 3 Mei 2019

Hal : 2





## Jalan Menuju Pura Goa Batu Metandal Pecatu Perlu Ditata

Mangupura (Bali Post) -

Jalan menuju kawasan Pura Goa Batu Metandal, Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan perlu ditata. Sebab, cukup banyak *pamedek* yang *tangkal* ke pura yang berada di tebing Pantai Nyang-nyang tersebut.

Menurut Bendesa Adat Pecatu I Made Sumerta, Rabu (1/5) kemarin, penataan infrastruktur kawasan tersebut mendesak dilakukan. Sebelumnya pada tahun 2018, Pemkab Badung menganggarkan Rp 6,7 miliar untuk penataan. Namun saat itu terkendala gagal tender. Pihaknya berharap, penataan bisa segera direalisasikan.

"Karena sulitnya medan menuju pura, ini menjadi usulan dari masyarakat maupun *pamedek* yang datang untuk sembahyang. Mudah-mudahan tahun 2019 bisa direalisasikan sehingga selain untuk akses ke pura, dengan penataan di

Pantai Nyang-nyang, akan bisa lebih banyak lagi potensi wisata yang bisa dikunjungi wisatawan," jelasnya.

Sumerta yang juga anggota DPRD Badung Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, kawasan Pantai Nyang-nyang merupakan pantai yang letaknya tersembunyi sehingga sering disebut *secret beach*. Lokasi ini banyak dikunjungi wisatawan mancanegara yang ingin berselancar dengan suasana yang tenang.

Namun, kata Sumerta, untuk lebih mempromosikan kawasan ini, ke depan pihaknya akan melakukan penataan. Pantai yang memiliki panorama eksotis ini diharapkan bisa dikembangkan untuk dijadikan salah satu tujuan wisata di Kabupaten Badung. Baik untuk wisatawan yang ingin menikmati pasir putih maupun surfing.

Di kawasan pantai ini ada warga yang menggarap lahan untuk menyediakan fasilitas

pendukung pariwisata. Bahkan Pemerintah Desa setempat memberikan dukung. Untuk itu, Pemkab Badung diharapkan bisa membantu sehingga pantai ini tidak menjadi kumuh, baik dari segi tata kelola maupun pembangunan.

"Di tempat ini juga dimanfaatkan untuk aktivitas paragliding. Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Badung bisa membantu dalam hal infrastruktur. Sehingga pantai tidak menjadi kumuh dengan bangunan yang tidak terkonsep dengan bagus," tegasnya.

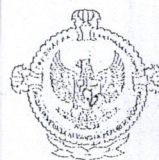
Salah seorang wisatawan asal Belanda, Marthin mengungkapkan, kawasan Pantai Nyang-nyang sangat indah. Selain memiliki pemandangan yang masih alami, bagi pecinta surfing juga disugahi ombak yang bagus.

"Kami baru pertama kali datang ke sini. Ombaknya sangat bagus untuk surfing. Tempat ini juga belum terlalu kredit," katanya. (kmb23)

Edisi : Kamis, 2 Mei 2019

Hal : 3





# Kepala SMAN Satap Nusa Penida Ditahan

Proses penahanan dilakukan sekitar pukul 13.00 Wita, setelah tersangka menjalani proses pemeriksaan sejak pukul 09.30 Wita. Dia langsung digiring ke Rutan Klungkung, ditemani kuasa hukumnya, Wayan Suniarta. Sepertinya dia sudah tahu akan ditahan, karena kedatangannya ke Kejari Klungkung kali ini sudah

lengkap membawa koper isi pakaian. Wayan Suniarta menegaskan, Beres berinisiatif sendiri membawa koper isi pakaian tersebut, setelah dijelaskan pemeriksaan saat berstatus tersangka, sebagian besar ditahan. "Sejauh ini belum ada permintaan penangguhan penahanan dari Pak Beres," katanya.

Kacabjari Nusa Penida Luga Harlianto mengatakan, penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan penahanan ini juga terkait sudah turunnya hasil audit kerugian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga, pihak kejaksaan memutuskan untuk melakukan

penahanan terhadap pria yang berasal dari Desa Pejuktan, Nusa Penida ini. "Ini untuk memenuhi ketentuan hukum. Untuk mempermudah proses selanjutnya. Agar, tersangka tidak melarikan diri," katanya.

Pihaknya menegaskan, kasus ini ditingkatkan ke penahanan tersangka Nyoman Beres, setelah pihak Kacabjari sudah memeriksa 25 orang saksi yang dianggap mengetahui proses terjadinya dugaan kasus korupsi DAK ini. Sehingga, sebelumnya dia sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 November 2018.

Sebelumnya, penyidik sudah berupaya melakukan pendekatan terhadap tersangka. Agar, mau berusaha mengembalikan uang negara yang diduga dikorupsi. Namun, niat baik penyidik tak diindahkan tersangka. Beres tetap tidak mau mengembalikan, sehingga kasus itu pun ditindaklanjuti, hingga dia ditetapkan sebagai tersangka. Luga menduga uang yang diduga dikorupsi, sudah dihabiskan untuk kepentingan pribadi.

Pembangunan ruang kelas SMAN Satap Nusa Penida di Tanglad, yang menjadi satu

dengan SMPN 5 Nusa Penida ini bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Kemendikbud pada tahun 2017. Kucuran dana sebesar Rp 860.907.000 ini, peruntukannya untuk membangun dua unit gedung di SMAN Satap Nusa Penida. Satu unit ada dua ruang kelas baru. Namun hingga masa pengerjaan bangunan selesai 27 Desember 2017, bangunannya justru tak tuntas. Satu unit bangunan yang dianggarkan Rp 361.936.138, hanya berupa rangka bangunan. Berdasarkan hasil audit BPKP terjadi kerugian mencapai Rp 166 juta.

Pembangunan tersebut melanggar Peraturan Presiden (Perpres) 123/2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik jo Permendikbud 9/2017 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan. Atas perbuatannya, Beres dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang 31/1999 jo Undang-undang 20/2001, dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang 31/1999 jo Undang-undang 20/2001 serta diancam dengan pasal pemalsuan sebagaimana Pasal 9 Undang-undang 20/2001. (kmb31)

Edisi : Kamis . 2 Mei 2019

Hal : 12





## Jalan Penarukan -Tampuagan Diajukan Jadi Jalan Kabupaten

BANGLI, NusaBali

Jalan desa yang menghubungkan Banjar Penarukan menuju Dusun Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Bangli akan diajukan menjadi jalan kabupaten. Jalan Penarukan-Tampuagan dibangun lewat program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 104, beberapa bulan lalu.

Perbekel Desa Peninjoan, I Dewa Nyoman Tagel, jalan penghubung Banjar Penarukan-Dusun Tampuagan hampir 1,5 kilometer dengan status jalan desa. Pihak desa masih merinci anggaran yang dihabiskan untuk pembuatan jalan TMMD tersebut. Sisa anggaran akan dialokasikan untuk drainase. "Pembuatan jalan ini memanfaatkan anggaran program Gerbang Gita Santhi (GGS) Rp 1 miliar lebih," unka Dewa Nyoman Tagel, Rabu (1/5).

Selaku perbekel, Dewa Nyoman Tagel akan mengajukan jalan Banjar Penarukan-Dusun



Kondisi jalan Penarukan-Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Bangli, Rabu (1/5).

Tampuagan menjadi jalan kabupaten. Dari total panjang jalan 31 kilometer di Desa Peninjoan, hampir 27 kilometer masuk aset Pemkab Bangli dan sudah dihotmik. "Jika sudah berstatus jalan kabupaten. Jalan Penarukan-Tampuagan bisa dihotmik dan menjadi tanggung jawab Pemkab Bangli," jelasnya.

Terpisah, Bendesa Adat Penarukan, I Nengah Reken mengungkapkan jalan pem-

buatan drainase. Menurutnya, tanpa drainase badan jalan cepat hancur, apalagi kondisi jalan memiliki kemiringan cukup terjal. Badan jalan juga masih perlu diratakan karena jalan menanjak dan tikungan tajam. "Kalau bisa pada posisi tanjakan dengan tikungan yang tajam dilakukan pengurukan agar badan jalan lebih landai. Ini bisa dilakukan saat dihotmix," pinta Nengah Reken yang juga anggota DPRD Bangli. **esa**

Edisi : Kamis, 2 Mei 2019

Hal : 8





## Kasus SMAN Satap Nusa Penida

# DAK Diduga Digunakan untuk Kepentingan Pribadi

Semarapura (Bali Post) -

Kejari Klungkung kini sedang melakukan pemberkasan dari kasus dugaan korupsi DAK Kemendikbud yang melibatkan tersangka Kepala SMAN Satap Nusa Penida, I Nyoman Beres. Setelah dijebloskan ke Rutan Klungkung, kini proses pemberkasan itu dikebut sebelum diserahkan kepada jaksa peneliti. Apabila sudah dinyatakan lengkap, maka tahapan selanjutnya dinyatakan P-21, sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Kacabjari Nusa Penida Luga Harlianto, Kamis (2/5) kemarin, mengatakan pascapenahanan Beres, pihaknya tidak lagi melakukan proses pemeriksaan saksi. Proses tersebut dengan menghadirkan sekitar 25 saksi, sudah dirasakan cukup untuk menuntaskan kasus ini.

Disinggung mengenai adanya dugaan keterlibatan pihak lain terhadap kasus

ini, dari bukti dan keterangan saksi-saksi, dikatakan belum ada mengarah pada tersangka lain. "Uang itu diterima sendiri dan dikelola sendiri. Jadi, sejauh ini tidak ada keterlibatan orang lain. Tetapi, meski demikian tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain ke depan itu ada," tegasnya.

Mengenai penggunaan anggarannya, ini sudah ter-

tuang jelas dalam hasil audit BPKP. Selain dugaan adanya kekurangan volume pengerjaan dan pemalsuan, juga ada dugaan dananya digunakan untuk kepentingan pribadi. Tetapi, pihaknya enggan menjelaskan lebih jauh mengenai dugaan tersebut, seperti apa persis kesalahan fatal yang dilakukan tersangka, khususnya detail dugaan dananya ada digunakan untuk

kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya seperti apa, dia menegaskan akan menjelaskan seutuhnya ketika prosesnya sudah masuk dalam tahapan persidangan. Pihaknya khawatir, bila itu diungkap semua saat ini, akan ada upaya-upaya untuk mengaburkan keterangan maupun barang bukti. "Setelah tersangka ditahan, sejauh ini juga tidak ada permintaan penanguhan penahanan," kata Luga.

Sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kasus serupa, pihaknya mengingatkan agar sekolah lainnya atau lembaga pemerintah daerah lainnya, bisa memanfaatkan

peran TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah). Kalau ada proyek besar, kemudian awam dalam eksekusinya, bisa dikonsultasikan lebih dulu dengan TP4D. Luga menegaskan, tentu dengan koordinasi, nanti akan diberikan pendampingan agar tidak ada pelanggaran hukum. "Mengenai JPU (Jaksa Penuntut Umum), nanti juga ada tim dari Kejari Klungkung. Kami akan berkolaborasi," tegasnya.

Terhadap kasus Beres ini, pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Seperti dokumen-dokumen pencairan, proposal, gambar, denah, keterangan saksi-saksi.

Seluruh bukti-bukti itu dirasakan cukup untuk menyeret tersangka ke meja hijau.

Seperti berita sebelumnya, Kepala SMAN Satap Nusa Penida I Nyoman Beres, akhirnya resmi ditahan pihak Kejari Klungkung di Rutan Klungkung, Selasa (30/4) lalu. Dia ditahan setelah hampir enam bulan menyandang status tersangka. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan untuk memudahkan proses pemanggilan dan pemeriksaan, serta agar tidak ada upaya melarikan diri. Sebab, setelah jadi tersangka, Beres mulai sulit dihubungi, bahkan sudah lama tak ngantor. (kmb31)





## Kunjungi SDN 1 Selat Komisi IV DPRD Badung Dorong Pemkab Rehabilitasi Gedung

KOMISI IV DPRD Badung melakukan kunjungan ke SD Negeri 1 Selat, Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Kamis (2/5) kemarin. Komisi IV mendorong pemerintah untuk segera melakukan rehabilitasi gedung SDN 1 Selat.

Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra mengatakan, Komisi IV sebagai *leading sector* di bidang pendidikan, wajib memperhatikan kualitas infrastruktur pendidikan di Badung. Melihat kondisi SDN 1 Selat saat ini, pihaknya mendorong pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung segera melakukan rehabilitasi terhadap gedung sekolah tersebut. "Ini sudah *emergency* maka harus segera kita tindak lanjuti," ujarnya di sela-sela kunjungan yang juga didampingi anggota Nyoman Gede Wiradana dan IB Alit Argapatra.

Selain gedung yang sudah layak direhab berat, Nadi Putra mengungkapkan, siswa di sekolah tersebut saat ini juga kekurangan ruang belajar. Apalagi, di SDN 1 Selat merupakan satu-satunya sekolah di desa tersebut. "Tahun ini akan ada penerimaan siswa baru, sedangkan jumlah siswa yang sekarang saja sudah melebihi kapasitas. Aturan 1 rombel kan 28 siswa, sedangkan di sini ada 222 siswa dengan 7 rombel. Artinya itu kan sudah melebihi, jika ini tidak segera ditindaklanjuti maka bisa melanggar aturan dari pusat," katanya.

Terkait permasalahan-permasalahan tersebut, dirinya meminta pihak sekolah bersama

Disdikpora segera mengambil solusi agar anak-anak semua tertampung dan siswa belajar dengan nyaman. "Ini juga harus dicarikan solusi. Sambil menunggu rehabilitasi dari pemerintah. Kami juga menyarankan sekolah agar sekalian mengusulkan kebutuhan perangkat baik itu komputer maupun LCD. Namun gedung dulu yang lebih *emergency*," ungkap pria yang disapa Rahtut ini.

Kabid Gedung dan Sarana Disdikpora Putu Roby Widya Harana mengatakan, rehabilitasi gedung SDN 1 Selat sudah dianggarkan sebesar Rp 3,3 miliar. DED, katanya, sudah dibuat tahun 2017 lalu, tahun 2019 ini masih dilakukan *review* untuk selanjutnya rehabilitasi gedung di tahun 2020. "Nanti akan dibuat 6 ruang belajar bertingkat. Mengingat lahan di sekolah tersebut tidak

terlalu besar. Masing-masing lantai juga akan dilengkapi toilet," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SDN 1 Selat Ni Made Sukayanti, S.Pd. SD, tidak menampik kondisi tersebut. Ia menjelaskan, saat ini sekolah yang dibangun tahun 1983 tersebut memiliki 222 siswa dengan tujuh kelas, satu kelas rata-rata 35 orang. "Bahkan ada yang satu kelas 40 orang. Karena kekurangan kelas, terpaksa gundang kami bersihkan untuk menampung siswa kelas I sebanyak 21 orang," tuturnya.

Bahkan, kata Sukayanti, ketika musim hujan ruang kelas banjir hingga semata kaki karena atapnya yang bocor. Pihaknya pun berharap pemerintah bisa segera melakukan rehabilitasi terhadap gedung sekolah yang baru dipimpinnya satu tahun itu. (ad126)





## Dorong Pemkab Rehabilitasi Gedung

**MANGUPURA** - Komisi IV DPRD Badung melakukan kunjungan ke SD Negeri 1 Selat, Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Kamis kemarin (2/5). Komisi IV mendorong pemerintah untuk segera melakukan rehabilitasi gedung SDN 1 Selat.

Ketua Komisi IV DPRD Badung, AAN Ketut Agus Nadi Putra mengatakan, Komisi IV sebagai leading sektor di bidang pendidikan, wajib memperhatikan kualitas infrastruktur pendidikan di Badung. Melihat kondisi SDN 1 Selat saat ini, pihaknya mendorong pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung segera melakukan rehabilitasi terhadap gedung sekolah tersebut. "Ini sudah emergency, maka harus segera kita tindaklanjuti," ujarnya disela-sela kunjungan yang juga didampingi anggota Nyoman Gede Wiradana dan IB Alit Argapatra.

Selain gedung yang sudah layak direhabilitasi, Nadi Putra mengungkapkan, siswa di sekolah tersebut saat ini juga kekurangan ruang belajar. Apalagi, di SDN 1 Selat merupakan satu-satunya sekolah di desa tersebut. "Tahun ini akan ada penerimaan siswa baru sedangkan jumlah siswa yang sekarang saja sudah melebihi kapasitas. Aturan, 1 rombongan belajar 28 siswa, sedangkan disini ada 222 siswa dengan 7 rombongan belajar. Artinya itu *kan* sudah melebihi, jika ini tidak segera ditindaklanjuti maka

bisa melanggar aturan dari pusat," katanya.

Terkait permasalahan-permasalahan tersebut, dirinya meminta pihak sekolah bersama Disdikpora segera mengambil solusi agar anak-anak semua tertampung dan siswa belajar dengan nyaman. "Ini juga harus dicarikan solusi. Sambil menunggu rehabilitasi dari pemerintah. Kami juga menyarankan sekolah agar sekalian mengusulkan kebutuhan perangkat baik itu komputer maupun LCD. Namun gedung dulu yang lebih emergency," ungkap pria yang disapa Rahtut ini.

Kabid Gedung dan Sarana Disdikpora, Putu Roby Widya Harsana mengatakan, rehabilitasi gedung SDN 1 Selat sudah dianggarkan sebesar Rp 3,3 M. DED katanya, sudah dibuat tahun 2017 lalu, tahun 2019 ini masih dilakukan review untuk selanjutnya rehabilitasi gedung di tahun 2020. "Nanti akan

dibuat 6 ruang belajar bertingkat. Mengingat lahan di sekolah tersebut tidak terlalu besar. Masing-masing lantai juga akan dilengkapi toilet," pungkasnya.

Sementara, Kepala Sekolah SDN 1 Selat, Ni Made Sukayanti, S.Pd.SD tidak menampik kondisi tersebut. Ia menjelaskan, saat ini sekolah yang dibangun tahun 1983 tersebut memiliki 222 siswa dengan tujuh kelas, satu kelas rata-rata 35 orang. "Bahkan ada yang satu kelas 40 orang. Karena kekurangan kelas, terpaksa gudang kami bersihkan untuk menampung siswa kelas 1 sebanyak 21 orang," tuturnya.

Bahkan, kata Sukayanti, ketika musim hujan ruang kelas banjir hingga semata kaki karena atapnya yang bocor. Pihaknya pun berharap, pemerintah bisa segera melakukan rehabilitasi terhadap gedung sekolah yang baru dipimpinnya satu tahun ini. (adv/rid)

Edisi : Jumat. 3 Mei 2019

Hal : 8